

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad ke-21 telah mengubah cara dunia berinteraksi, terutama dalam konteks hubungan internasional. Dunia digital saat ini telah berkembang menjadi arena baru di mana kekuatan politik, ekonomi, dan ideologi antarnegara bersaing. Dunia kini tidak hanya bersaing dalam perdagangan atau militer, mereka juga bersaing untuk menguasai infrastruktur teknologi, mengontrol data, dan mengatur data. Istilah kedaulatan digital juga dikenal sebagai *digital sovereignty*, muncul sebagai upaya negara untuk mempertahankan otoritas atas infrastruktur teknologi, data, dan undang-undang ruang digital (Goldsmith & Wu, 2006). Konsep ini semakin relevan dalam konteks negara-negara berkembang yang berusaha mempertahankan kedaulatan negara dengan ikut berpartisipasi dalam ekosistem digital global. Kekuasaan digital bukan hanya masalah hukum atau teknis, tetapi juga alat politik yang digunakan oleh negara untuk menyampaikan pesan strategis kepada mitra dan lawan internasionalnya. Dalam konteks tersebut, masalah kedaulatan digital muncul sebagai tanggapan negara terhadap dominasi platform digital asing yang dianggap dapat membahayakan keamanan, identitas nasional, dan struktur politik dalam negeri. Beberapa tahun terakhir, sejumlah negara telah melarang aplikasi digital buatan Tiongkok, terutama TikTok untuk tujuan politik internasional. Hal ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana kedaulatan digital digunakan untuk tujuan tersebut. India adalah salah satu dari banyak

negara yang mengambil tindakan ini sebagai tanggapan langsung terhadap ketegangan geopolitik yang muncul dengan Tiongkok setelah bentrokan militer di Lembah Galwan pada Juni 2020 (Rajeev & Nachiappan, 2021).

Pemerintah India pada 29 Juni 2020 untuk melarang TikTok bersama dengan 59 aplikasi lain yang berasal dari Tiongkok. Langkah ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga simbolis, karena dilakukan dalam konteks eskalasi ketegangan bilateral setelah konflik perbatasan yang menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak (Mishra et al., 2022). Hubungan antara India dan Tiongkok semakin memburuk, terutama setelah bentrokan militer di wilayah perbatasan Galwan. Dalam *The New York Times*, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India menyatakan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut mengancam kedaulatan dan integritas India, dan keamanan nasional. Tindakan ini tidak hanya merupakan respons keamanan, tetapi juga memiliki implikasi politik luar negeri yang kuat. Seperti dijelaskan oleh Rajeev & Nachiappan (2021) dalam artikel *Tik-Tok-ed: India's Ban on Chinese Apps*, pelarangan TikTok dimaksudkan untuk memberi sinyal keras kepada Tiongkok bahwa India tidak akan mentoleransi pelanggaran kedaulatan baik secara fisik maupun digital. Mereka menyatakan bahwa keputusan ini memperlihatkan perubahan pendekatan India dalam diplomasi digital.

Dalam konflik India-Tiongkok, pelarangan TikTok dianggap sebagai kebijakan ekonomi dan respons terhadap ancaman keamanan digital yang meningkat. TikTok, aplikasi populer dengan ratusan juta pengguna di India, dikhawatirkan mengumpulkan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan

pemerintah Tiongkok karena undang-undang *National Intelligence Law of the PRC* (2017), yang mengharuskan perusahaan swasta untuk membantu operasi intelijen negara. Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi India bukan hanya privasi data, tetapi mereka juga menghadapi ancaman spionase digital yang mengancam kedaulatan nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan di era digital tidak lagi terbatas pada militer atau teritorial, di mana sekarang ancaman tersebut mencakup penguasaan data dan ruang siber. Beberapa kasus seperti penyalahgunaan data jurnalis oleh karyawan ByteDance, denda *General Data Protection Regulation* Eropa atas transfer data tanpa izin, dan pernyataan *god credential* mantan eksekutif ByteDance meningkatkan kekhawatiran tentang spionase langsung di TikTok (Apnews, 2025). Namun, bukti langsung spionase masih sedikit, oleh karena itu, India percaya bahwa ancaman keamanan digital ini benar-benar ada, dan hukum sekuritisasi mengizinkan pelarangan TikTok.

Namun, pelarangan tersebut tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang keamanan nasional. Di balik narasi resmi tentang ancaman terhadap data pengguna dan kedaulatan digital, terdapat agenda politik dan ekonomi yang lebih besar. Pemerintah India, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, telah gencar menggalakkan inisiatif seperti Digital India, Make in India, dan Atmanirbhar Bharat (India Mandiri) sebagai upaya membangun kapasitas teknologi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada teknologi asing (Joseph, 2021). Pelarangan TikTok, salah satu platform media sosial paling populer di India, merupakan langkah simbolis sekaligus pragmatis

dalam mendorong pertumbuhan *startup* lokal dan memperkuat otoritas negara atas ruang digital. Dengan kata lain, pelarangan TikTok bukan hanya bentuk proteksi terhadap data warga, namun sebagai simbol keinginan India untuk menjadi pemain utama dalam tata kelola internet dalam konteks global.

Dari perspektif teori hubungan internasional, pelarangan TikTok dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi *soft power* dan *hard power* serta manifestasi dari proyeksi kekuasaan India dalam ranah digital. Menurut Rajeev dan Nachiappan (2021), pelarangan TikTok di India menunjukkan dinamika baru dalam diplomasi digital di mana negara menggunakan kebijakan teknologi sebagai alat tekanan atau balasan dalam hubungan internasional. Hal ini sesuai dengan pendekatan *TikTok politics* yang diidentifikasi oleh Mishra et al. (2023), yang menjelaskan bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain di dunia digital sebagai refleksi dari perselisihan geopolitik. Dalam konteks hubungan India-Tiongkok, pelarangan TikTok menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa kekuatan politik di luar negeri dapat digunakan untuk memanipulasi pasar online. Dan dalam kasus India, pelarangan TikTok bukan hanya soal kontrol atas data, tetapi juga bagian dari diplomasi digital untuk menunjukkan bahwa India memiliki kemampuan dan kehendak untuk bertindak secara independen di tengah rivalitas Tiongkok–Amerika Serikat dalam dominasi teknologi global.

Kemudian, India sedang berusaha untuk membangun sistem kedaulatan digital yang lebih independen, menurut Kumar dan Thussu (2023) dalam karya mereka berjudul *Media, Digital Sovereignty and Geopolitics*. Kebijakan pelarangan TikTok memiliki dua tujuan yaitu melindungi dan memperkuat

posisi India di dunia digital. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Riaz, Mathai, dan Sharma (2022) dalam *Regulatory tactics to ban TikTok: Case studies from Pakistan, India and United States* menunjukkan bahwa, meskipun alasan keamanan nasional dan perlindungan data sering disebut sebagai alasan untuk pelarangan, dalam banyak kasus, seperti di India, pelarangan memiliki dasar politik. Regulasi digital bukan lagi hanya masalah teknis dan hukum, tetapi itu juga menunjukkan kepentingan strategis negara di mata dunia. Pelarangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kebebasan internet dan hak digital warganya. Banyak analis khawatir bahwa tindakan seperti ini dapat digunakan untuk mengontrol arus informasi dan mengurangi ruang demokrasi digital, meskipun alasan keamanan sering digunakan untuk membenarkan tindakan represif terhadap platform digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami pelarangan TikTok dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana dunia digital berubah menjadi arena diplomatik baru di mana negara-negara bersaing, berkolusi, dan menegaskan identitas politiknya.

Penelitian tentang pelarangan TikTok di India penting untuk dilakukan karena fenomena ini menggambarkan transformasi baru dalam pemahaman kedaulatan dan diplomasi di era digital. Semula dianggap sebagai ruang bebas batas, internet sekarang menjadi arena persaingan kekuasaan di mana negara menggunakan regulasi digital sebagai alat untuk mengontrol dan *soft power* untuk berinteraksi dengan negara lain (Riaz et al., 2020). Studi ini akan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kedaulatan digital berfungsi sebagai alat politik yang efektif di dalam negeri dan di luar negeri. Dengan

demikian, penting untuk menganalisis bagaimana pelarangan TikTok oleh India tidak hanya sekadar kebijakan domestik, tetapi bagian dari strategi politik luar negeri yang lebih besar, yang berakar pada konsep kedaulatan digital dan pendekatan sekuritisasi terhadap teknologi asing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pelarangan TikTok oleh pemerintah India sebagai manifestasi dari penerapan kedaulatan digital sebagai alat politik luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji pelarangan TikTok oleh pemerintah India sebagai manifestasi dari penerapan kedaulatan digital sebagai alat politik luar negeri. Dengan memposisikan fenomena ini dalam konteks hubungan internasional dan strategi diplomatik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam memahami bagaimana kedaulatan digital digunakan oleh negara sebagai alat diplomasi dalam pertarungan geopolitik era digital.

Dengan demikian, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “Mengapa pemerintah India melakukan pelarangan TikTok pada tahun 2020 sebagai upaya mempertahankan kedaulatan digital terhadap Tiongkok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Pemerintah India menggunakan pelarangan TikTok sebagai bagian dari strategi politik luar negeri dalam merespons ketegangan dengan Tiongkok pasca-bentrok di Lembah Galwan,
2. Untuk memahami penggunaan konsep kedaulatan digital sebagai instrumen proyeksi kekuasaan negara dalam konteks hubungan internasional kontemporer.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang konsep kedaulatan digital dan pemanfaatannya dalam politik luar negeri,
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa, terutama terkait geopolitik teknologi, kedaulatan digital, dan konflik India-Tiongkok,
3. Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami interaksi antara teknologi, keamanan nasional, dan hubungan internasional di era digital,
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, khususnya di Indonesia, dalam merancang kebijakan digital yang berimbang antara perlindungan kedaulatan nasional dan partisipasi dalam ekosistem digital global.

1.5 Sistematika BAB

Penelitian ini terbagi ke dalam lima BAB dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusuan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan bab. Latar belakang penelitian berisi alasan-alasan yang kuat dalam mendukung penelitian.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dan landasan utama penelitian. Bab ini juga mencakup teori yang relevan, seperti *securitization theory*, dan *digital sovereignty theory*.

3. BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

4. BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil kajian dan analisis mendalam tentang pelanggaran TikTok oleh India, dengan merujuk pada kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah.

5. BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian.